

**ANALISIS PERBANDINGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
(SAP) NO 71 TAHUN 2010 PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



Nama : Rio Dwi Nugraha

Nim : 22.2009.216

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2015**

**ANALISIS PERBANDINGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
(SAP) NO 71 TAHUN 2010 PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Rio Dwi Nugraha

Nim : 22.2009.216

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2015**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang beranda tangan dibawah ini:

Nama : Rio Dwi Nugraha

NIM : 22 2009 216

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang Maret 2015

Penulis,



Rio Dwi Nugraha

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **Analisis Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No 71 Tahun 2010 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Nama : **Rio Dwi Nugraha**
Nim : **22 2009 216**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**
Program Studi : **Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok : **Akuntansi Sektor Publik**

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal .23. April. 2015.....**

Pembimbing,



Welly. S.E. M.Si.
NIDN : 0212128102



Rosalina Ghazali, S.E., Ak. M.Si
NIDN : 0228115802

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Motto:

"Melakukan hal yang berguna, mengatakan suatu keberanian dan merenungkan suatu keindahan adalah hal yang perlu dilakukan dalam kehidupan seseorang"

(TS Eliot)

❖ *Ku persembahkan Kepada :*

- *Ayah dan Ibuku Tercinta*
- *Kakak dan Adikku Tersayang*
- *Keluarga Besariku Tercinta*
- *Sahabat - sahabatku*
- *Almamater*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil alamin, dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T. Yang telah memberikan rahmat, dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No 71 Tahun 2010 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan” tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terimakasih yang sangat tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku, yaitu Yusuf Supriadi dan Yeyet Sumiati yang telah mendidik, mendoa'kan, memberi dukungan serta materi kepada penulis. Kepada saudara-saudariku yaitu Eka dan Erlita, saya ucapkan terimakasih karena telah memberikan dorongan semangat dan do'a yang tulus setiap perjuangan ku. Serta Keluarga - keluargaku : Mimih, Wenda, Tiqah, Bi Yoyoh, Yogi, Yopie, Bi Cicih, Mang toto, Mang Budi. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Om Alex

Wattimena, Tante Yanti dan Dwitya Alshehana .W yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan sangat berterimakasih kepada Ibu Welly, S.E, M. Si yang telah membimbing, mengarahkan dengan penuh kesabaran dan memberikan saran-saran berguna dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak DR. H. M. Idris, S.E., M. Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Abid Djazuli, S.E., MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Wakil-wakilnya.
3. Ibu Rosalina Ghozali, S.E., Ak, M.S.i selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Welly, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis selama mengerjakan skripsi.
5. Bapak dan Ibu serta Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang atas bantuan dan perhatiannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

6. Teman-teman semasa kuliah Andi Herwansyah, Faqih Abdullah, Andriantiatno.

Kerendahan hati yang tulus, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga amal ibadah yang dilakukan mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. amin.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Maret 2015

Penulis



Rio Dwi Nugraha

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	8
B. Landasan Teori	11
1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).....	11

2. SAP yang berlaku di Indonesia.....	12
3. Komponen Laporan Keuangan.....	12
4. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan.....	13
5. Asumsi Dasar.	18
6. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	20
7. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	24
8. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal.....	27
9. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan.....	31
10. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan.....	32
11. Format Penyajian Laporan Keuangan menurut SAP No. 71 Tahun 2010.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Operasional Variabel	42
D. Data yang Digunakan	43
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Analisis Data dan Teknis Analisis	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	46
1. Sejarah Singkat BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.....	46

2. Visi dan Misi	47
3. Tujuan dan Sasaran.....	48
3. Struktur Organisasi BPKAD.....	48
4. Tugas Dan Fungsi BPKAD Sumsel.....	51
5. Data Personalia.....	65
B. Pembahasan Hasil Penelitian	67
1. Laporan Neraca	67
2. Laporan Realisasi Anggaran.....	71
3. Laporan Arus Kas	78
4. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	84
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	89
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Neraca 5
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya 10
Tabel II.2	Neraca Pemerintah Provinsi..... 33
Tabel II.3	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi..... 35
Tabel II.4	Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi..... 37
Tabel II.5	Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi..... 39
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel 42
Tabel IV.1	Data Personalialia BPKAD Provinsi Sumatera Selatan 66
Tabel IV.2	Neraca BPKAD Prov. Sumatera Selatan 68
Tabel IV.3	Laporan Realisasi Anggaran Pemprov Sumatera Selatan..... 75
Tabel IV.4	Hasil Analisis Laporan Realisasi Anggaran BPKAD 77
Tabel IV.5	Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 81
Tabel IV.6	Hasil Analisis Laporan Arus Kas BPKAD 83
Tabel IV.7	Catatan Atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel..... 87

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Selesai Riset dari Tempat Penelitian**
- Lampiran 2 : Sertifikat Membaca dan Menghafal Al Quran (Surat Pendek)**
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Mengikuti Tes TOEFL**
- Lampiran 4 : Fotocopy Kartu Bimbingan Aktivitas Bimbingan Skripsi**
- Lampiran 5 : Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi**
- Lampiran 6 : Biodata Penulis**

ABSTRAK

Rio Dwi Nugraha /222009216/2015 Analisis Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No 71 Tahun 2010 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perbandingan penyajian laporan keuangan pemerintah dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 71 Tahun 2010 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Jenis penelitian ini adalah komparatif. Variabel adalah kualitas laporan keuangan. Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara langsung dan data sekunder berupa struktur organisasi dan laporan keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Metode analisis menggunakan metode analisis Kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil perbandingan diketahui laporan keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010.

Kata kunci : laporan keuangan, Perbandingan, SAP No.71 Tahun 2010.

ABSTRACT

Rio Dwi Nugraha /222009216/2015 Comparative Analysis of Government Financial Statements With the Government Accounting Standards (SAP) No. 71 Year 2010 In Finance and Asset Management Agency Regions of South Sumatra Province.

Formulation of the problem in this research is how the government's financial statement presentation comparison with Government Accounting Standards (SAP) No. 71 In 2010 the Board of Finance and Asset Management South Sumatra Province.

This research is comparative. The variable is the quality of the financial statements. Interview data collection techniques and documentation. The data used in this study are primary data and secondary data. The primary data of direct interviews and secondary data in the form of organizational structure and financial reports BPKAD South Sumatra Province. Methods of analysis using qualitative and quantitative analysis methods.

These results indicate that the results of the comparison are known financial statements In Finance and Asset Management Agency Region South Sumatra Province are in accordance with Regulation No. 71 of 2010.

Keywords: financial statements, Comparison, SAP 71 Year 2010.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan dengan keputusan presiden. Dalam penyusunan standar harus melalui langkah-langkah tertentu termasuk dengar pendapat (*hearing*), dan meminta pertimbangan mengenai substansi kepada Badan Pemeriksaan Keuangan sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Kemudian pada tanggal 13 Juni 2005 Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Tahun 2010 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga sejak saat itu PP No. 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. PP No. 71 Tahun 2010 mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual.

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Furqon, 2012).

Laporan pelaksanaan anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sedangkan yang termasuk laporan finansial adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

Laporan keuangan (*financial statement*) adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan serta laba dan ruginya. Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk mengarah pada tujuan tertentu. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi. Di samping itu juga untuk menunjukkan pertanggungjawaban

(*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber daya-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Iswanto,2012).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: Relevan, laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. Andal, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan matrial dan menyajikan setiap fakta secara jujur. Informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan, informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dapat di pahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan secara mungkin mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu instansi yang ada di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam menjalankan kegiatan dan program kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tentu menggunakan dana APBD Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di instansi ini, diketahui bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Sumatera Selatan telah menerapkan PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Namun pada proses pelaksanaan pembuatan laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki berbagai kendala dari cara penyajian, pelaporan, dan pencatatan laporan keuangan, maka perlu dilakukan evaluasi dalam proses penerapan standar akuntansi pemerintah No. 71 tahun 2010 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Laporan keuangan pemerintah menurut SAP terdiri dari pertama, Laporan Realisasi Anggaran yaitu menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan, yang kedua neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada dana tertentu, yang ketiga Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu, yang keempat Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, dan yang kelima Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berbasis akrual. Dilihat dari laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera

Selatan diketahui laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah No 71 tahun 2010.

Berikut tabel neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 :

Tabel I.1
Neraca
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Per 31 Desember 2013, 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2013	2012	2011
ASET			
ASET LANCAR	471.835.457.418,49	794.428.187.464,54	496.227.005.513,78
INVESTASI JANGKA PANJANG	864.840.603.927,53	905.034.054.586,35	814.827.339.674,46
ASET TETAP	14.052.853.084.940,70	13.866.447.659.953,40	12.917.214.454.019,53
DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00
ASET LAINNYA	1.255.738.096.895,08	386.029.410.816,81	367.860.973.277,99
JUMLAH ASET	16.645.267.243.181,80	15.951.939.312.821,10	14.596.129.772.495,76
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	990.139.970.741,66	480.883.012.267,91	289.755.898.459,63
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	990.139.970.741,66	480.883.012.267,91	289.755.898.459,63
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR	(518.304.513.323,17)	313.545.175.196,63	206.471.107.054,15
EKUITAS DANA INVESTASI	16.173.431.785.763,30	15.157.511.125.356,56	14.099.902.766.971,98
EKUITAS DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA	15.655.127.272.440,10	15.471.056.300.553,19	14.306.373.874.026,13
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	16.645.267.243.181,80	15.951.939.312.821,10	14.596.129.772.485,76

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015.

Berdasarkan Tabel Data 1 di atas bahwa jumlah kewajiban dan ekuitas dana dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 kewajiban dan ekuitas dana yaitu sebesar Rp. 14.596.129.772.485,76 dan di tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi Rp. 15.951.939.312.821,10 dan pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi Rp. 16.645.267.243.181,80. Berdasarkan tabel di atas BPKAD menyajikan laporan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap, kewajiban jangka panjang,

kewajiban jangka pendek dan ekuitas. Untuk laporan yang lain belum diketahui lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimanakah perbandingan penyajian laporan keuangan pemerintah dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 71 Tahun 2010 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan penyajian laporan keuangan pemerintah dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 71 Tahun 2010 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan mengenai PP No. 71 tahun 2010 terhadap penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera

Selatan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akan bermanfaat bagi tempat penelitian yaitu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyajikan Laporan Keuangan sesuai PP No. 71 tahun 2010.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan bahan perbandingan sebagai salah satu sumber informasi dalam penyusunan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Nadya Karima (2015) melakukan penelitian dengan judul evaluasi laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintah No.71 tahun 2010 pada Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi laporan keuangan pada Sekretaris Daerah kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan menurut Standar Akuntansi Pemerintah No 71 tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan standar akuntansi dan laporan keuangan pada satuan kerja Sekretaris Daerah kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data adalah dengan Kuisisioner dan dokumentasi. Kuisisioner yaitu dibagikan kepada perangkat kerja pada Sekretaris Daerah kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan sedangkan dokumentasi yaitu dengan cara melihat data laporan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya.

Hasil penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa laporan keuangan Sekretaris Daerah kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan telah sesuai dengan SAP No. 71 Tahun 2010.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Akbar Reza (2014) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah membahas tentang fakto-

faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian internal, teknologi informasi, sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Studi kasus pada pemerintahan kota dari kabupaten bandung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuisisioner dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis statistik regresi berganda yang sebelumnya telah di uji dengan uji instrumen dan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama tidak terdapat pengaruh signifikan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kedua, terdapat pengaruh signifikan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ketiga terdapat pengaruh signifikan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Keempat terdapat pengaruh signifikan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kelima adanya pengaruh signifikan pengendalian internal, teknologi informasi, sumber daya manusia, dan standar akuntansi pemerintah secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian sebelumnya menjelaskan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berikut tabel yang menunjukkan perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya :

Tabel II.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian Sebelumnya	Perbedaan	Persamaan
1	Nadya Karima (2015)	Evaluasi laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintah No.71 tahun 2010 pada Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.	Penelitian sekarang membahas penerapan SAP dalam laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada Sekretaris Daerah kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.	Membahas tentang penerapan dan pengaruh standar akuntansi pemerintahan (SAP).
2	Akbar, Reza Ali (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah..	Perbedaan penelitian sekarang dengan sebelumnya yaitu merupakan penelitian assosiatif. Sedangkan penelitian sekarang merupakan penelitian komparatif.	Pada penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang membahas tentang penerapan dan pengaruh standar akuntansi pemerintah.

Sumber : Penulis, 2015.

B. Landasan Teori

1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). SAP dinyatakan dalam bentuk pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu SAP juga dilengkapi dengan kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Bergulirnya era reformasi memberikan sinyal yang kuat akan adanya transparansi dan akuntabilitas pengolahan keuangan negara. Salah satunya adalah PP 105/2000 yang secara eksplisit menyebutkan perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Tahun 2002, Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun Konsep Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dari daerah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 308/KMK.012/2002.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus

disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2. SAP yang berlaku di Indonesia

- a. Pada tanggal 13 Juni 2005 Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- b. Pada tahun 2010 diterbitkan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga sejak saat itu PP No 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. PP 71 Tahun 2010 mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual.

3. Komponen Laporan Keuangan

Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010, laporan keuangan pokok terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Selain laporan keuangan pokok di atas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

Indra Bastian (2006:376) komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Posisi Keuangan/Neraca
- b. Laporan Arus Kas
- c. Laporan Kinerja Keuangan/Surplus – Defisit
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Nota Perhitungan Anggaran
- f. Catatan atas Laporan Keuangan

Deddi Nordiawan (2006:36) laporan keuangan pokok, terdiri atas :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan atas Laporan Keuangan

Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan

Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan Laporan keuangan terutama

digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010, setiap entitas pelaporan dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodeik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jika pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Indra Bastian (2006:388) tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan dengan cara :

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya-sumber daya finansial.
- b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai akyivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- c. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam mendanai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya

- d. Menyediakan informasi mengenai kondisi finansial suatu entitas dan perubahan di dalamnya, dan
- e. Menyediakan informasi agregat yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas dalam hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Deddi (2006:34) merupakan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

- a. Akuntabilitas
- b. Manajemen
- c. Transparansi
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

5. Asumsi Dasar

Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat ditetapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi baik entitas pelaporan maupun akuntansi, dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dan pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggarannya dan melaksanakan dengan tanggungjawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya diluar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
- b. Asumsi kesinambungan entitas bermakna laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut kebenarannya.
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang diartikan bahwa laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

Deddi (2006:37) merupakan asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu

kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas :

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antarunit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat ditetapkan yang terdiri atas asumsi kemandirian entitas, asumsi kestinambungan entitas dan asumsi keterukuran dalam satuan uang.

6. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010, karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintahan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dan informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan yaitu :

1) Memiliki umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan dan mengoreksi ekspektasi dimasa lalu.

2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan

berguna dalam pengambilan keputusan.

4) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan dan menggambarkan fakta secara jujur serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

1) Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2) Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji. Dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda.

3) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut di ungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna di asumsikan untuk memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna mempelajari informasi yang dimaksud.

Deddi (2006:38) menjelaskan Karakteristik laporan keuangan adalah ukuran - ukuran normatif yang perlu di wujudkan dalam informasi akuntansi

sehingga dapat memenuhi tujuannya. Agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik berikut :

a. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan (*predictive value*), dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka (*feedback value*). Selain itu, suatu informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat di verifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

c. Dapat dibandingkan

informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik laporan keuangan adalah ukuran - ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

7. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang dimaksud sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuatan standar dalam menyusun standar, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta penggunaan laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang di sajikan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah :

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikan laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

b . Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

c. Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya.

e. Periode-sitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat di ukur dan posisi sumber yang dimilikinya dapat ditentukan.

f. Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode oleh suatu entitas pelaporan.

g. Pengungkapan lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

h. Penyajian wajar

Laporan keuangan menyajikan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Deddi (2006:39) menjelaskan delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut :

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan basis aktiva untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

b. Prinsip Nilai Historis

Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas.

c. Prinsip Realisasi

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

d. Prinsip Substansi Mengungguli bentuk formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi atau peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka, transaksi atau peristiwa lain

yang seharusnya disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.

e. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan laporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

f. Prinsip konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi - informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip - prinsip yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah suatu ketentuan yang dipahami dan ditaati dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

8. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010, kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan

terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitation*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah yaitu:

- a. Materialitas: walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas, informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
- b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat : manfaat yang dihasilkan seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang memiliki manfaat.
- c. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif: diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara bertujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan.

Mardiasmo (2002:144) menjelaskan kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut :

a. Objektivitas

Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan.

b. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut.

c. Daya Banding

Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.

d. Tepat Waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

e. Ekonomis dalam Penyajian Laporan

Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut.

f. Materialitas

Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan, atau

jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda.

Deddi (2006:40) menjelaskan kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam menciptakan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan. Hal - hal tersebut adalah :

a. Materialitas

Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya.

c. Keseimbangan antarkarakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai

suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam menciptakan informasi

akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan.

9. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010, Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, equitas pendapatan, laporan realisasi anggaran belanja, pembiayaan, pendapatan dan beban. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa penting tersebut akan mengalir keluar atau masuk kedalam entitas pelaporan yang bersangkutan.
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Abdul (2007: 112) menjelaskan suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria di bawah ini :

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat di peroleh pemerintah.

- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

10. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010, Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran atau penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk perolehan aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Abdul (2007:113) menjelaskan pengukuran aset adalah sebagai berikut :

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal
- d. Persediaan dicatat sebesar :
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

- 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pos dalam laporan keuangan dapat diukur dengan menggunakan nilai historis.

11. Format Penyajian Laporan Keuangan menurut SAP No. 71 Tahun 2010

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAP) No. 71 Tahun 2010

laporan keuangan Pemerintah Provinsi dapat di lihat pada :

Tabel II.2
Neraca
Pemerintah Provinsi
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
11	Belanja dibayar di muka	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah lainnya	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
18	Piutang lainnya	xxx	xxx
19	Persediaan	xxx	xxx
20	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)	xxx	xxx
21			
22	INVESTASI JANGKA PANJANG		
23	Investasi Nonpermanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Investasi Dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx

26	Investasi Dalam Proyek Pembangunan	XXX	XXX
27	Investasi Non Permanen Lainnya	XXX	XXX
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (24s/d 27)	XXX	XXX
29	Investasi Permanen		
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
31	Investasi Permanen Lainnya	XXX	XXX
32	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)	XXX	XXX
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28+ 32)	XXX	XXX
34			
35	ASET TETAP		
36	Tanah	XXX	XXX
37	Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
38	Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
39	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX
40	Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX	XXX
42	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
43	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)	XXX	XXX
44			
45	DANA CADANGAN		
46	Dana Cadangan	XXX	XXX
47	Jumlah Dana Cadangan (46)	XXX	XXX
48			
49	ASET LAINYA		
50	Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
51	Tuntutan Ganti Rugi	XXX	XXX
52	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
53	Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
54	Aset Lain-Lain	XXX	XXX
55	Jumlah Aset Lainnya (50s/d 54)	XXX	XXX
56			
57	JUMLAH ASET (20+33+43+47+55)	XXX	XXX
58			
59	KEWAJIBAN		
60			
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
63	Utang Bunga	XXX	XXX
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	XXX	XXX
65	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	XXX
66	Utang Belanja	XXX	XXX
67	Utang Jangka Pendek Lainnya	XXX	XXX
68	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)	XXX	XXX
69			
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
71	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
73	Premium (Diskonto) - Obligasi	XXX	XXX
74	Utang Jangka Panjang Lainnya	XXX	XXX
75	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74)	XXX	XXX
76	JUMLAH KEWAJIBAN (68+75)	XXX	XXX
77			
78	EKUITAS		
79	EKUITAS	XXX	XXX
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+79)	XXX	XXX

Sumber : Standar Akuntansi Pemerintah N0.71 Tahun 2010

Tabel II.3
Pemerintah Provinsi
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X1
1	<u>PENDAPATAN</u>				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retrubusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xx</u>	<u>xxx</u>
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>	<u>xx</u>	<u>xxxx</u>
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA				
11	PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xx</u>	<u>xxx</u>
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (13 s.d 12)	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>	<u>xx</u>	<u>xxxx</u>
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus				
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Trasfer Pemerintah Pusat Lainnya (18 s/d19)	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xx</u>	<u>xxx</u>
21	Total Pendapatan Transfer (15+20)	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>	<u>xx</u>	<u>xxxx</u>
22					
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
25	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
26	Pendapatan Lainnya	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>	<u>xx</u>	<u>xxxx</u>
27	Jumlah Pendapatan Lain - lain yang Sah (24 s/d 28)	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>	<u>xx</u>	<u>xxxx</u>
28	JUMLAH PENDAPATAN (7+21+27)	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>	<u>xx</u>	<u>xxxx</u>
29	<u>BELANJA</u>				
30	BELANJA OPERASI				
31	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
32	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
33	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
34	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
35	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
36	Bantuan Sosial	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xx</u>	<u>xxx</u>
37	Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 38)	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>	<u>xx</u>	<u>xxxx</u>

38					
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
41	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
42	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
43	Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
45	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
47					
48	BELANJA TAK TERDUGA				
49	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
50	Jumlah Belanja Tak Terduga (49 s/d 49)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
51	JUMLAH BELANJA (37+46+50)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
52					
53	<u>TRANSFER</u>				
54	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA				
55	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
56	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
58	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE KAB/KOTA (55 s/d 57)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
59	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51+58)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
60					
61	SURPLUS/DEFISIT (28-59)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
62					
63	<u>PEMBIAYAAN</u>				
64					
65	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
66	Penggunaan SILPA	XXX	XXX	XX	XXX
67	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
69	Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
70	Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
71	Pinjaman Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
72	Pinjaman Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
73	Pinjaman Dalam Negeri Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
74	Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
75	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
76	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
77	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
78	Jumlah Penerimaan (66 s/d 77)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
79					
80	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
81	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
82	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	XXX	XXX	XX	XXX

85	Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
92	Jumlah Pengeluaran (81 s/d 91)	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>	<u>xx</u>	<u>xxxx</u>
93	PEMBIAYAAN NETO (78-92)	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>	<u>xx</u>	<u>xxxx</u>
94					
95	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (61+93)	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>	<u>xx</u>	<u>xxxx</u>

Sumber : Standar Akuntansi Pemerintah N0.71 Tahun 2010

Tabel II.4
Laporan Arus Kas
Pemerintah Provinsi
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 dan 20x0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X1
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	xxx	xxx
4	Penerimaan Retribusi Daerah	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	xxx	xxx
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	xxx	xxx
13	Penerimaan Hibah	xxx	xxx
14	Penerimaan Dana Darurat	xxx	xxx
15	Penerimaan Lainnya	xxx	xxx
16	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
17	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16)	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
18	Arus Keluar Kas		
19	Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
20	Pembayaran Barang	xxx	xxx
21	Pembayaran Bunga	xxx	xxx
22	Pembayaran Subsidi	xxx	xxx
23	Pembayaran Beban Hibah	xxx	xxx
24	Pembayaran Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx
25	Pembayaran Tak Terduga	xxx	xxx
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx

27	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
28	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
29	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	XXX	XXX
30	Jumlah Arus Keluar Kas (19 s/d 29)	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas operasi (17 s/d 30)	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
33	Arus Masuk Kas		
34	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
35	Penjualan Atas Tanah	XXX	XXX
36	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
37	Penjualan atas Gedung & Bangunan	XXX	XXX
38	Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
39	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
40	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
41	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
42	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX	XXX
43	Jumlah Arus Masuk Kas (32 s/d 42)	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
44	Arus Keluar Kas		
45	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
46	Penjualan Atas Tanah	XXX	XXX
47	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
48	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
49	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX
50	Perolehan Aset tetap Lainnya	XXX	XXX
51	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX
54	Jumlah Arus Keluar Kas (45 s/d 53)	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
55	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (43-54)	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
56	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
57	Arus Masuk Kas		
58	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
60	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
62	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
64	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
65	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
67	Jumlah Arus Masuk Kas (58 s/d 66)	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
68	Arus Keluar Kas		
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX

73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
75	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
76	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
77	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
78	Jumlah Arus Keluar Kas (69s/d 77)	XXXX	XXXX
79	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (67 – 78)	XXXX	XXXX
	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris		
80	Arus Masuk Kas		
81	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
82	Jumlah Arus Masuk Kas (82)	XXXX	XXXX
83	Arus Keluar Kas		
84	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
85	Jumlah Arus Keluar Kas (85)	XXXX	XXXX
86	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (83 s/d 86)	XXXX	XXXX
87	Kenaikan/Penurunan Kas (31+55+79+87)	XXXX	XXXX
88	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	XXXX	XXXX
89	Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran (88+89)	XXXX	XXXX
90	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXXX	XXXX
91	Saldo akhir Kas (88+89+90)	XXXX	XXXX
92		XXXX	XXXX

Sumber : Standar Akuntansi Pemerintah N0.71 Tahun 2010

Tabel II.5
Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
Bab I Pendahuluan	
A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.	
B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.	
C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan	
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja	
APBD	
A. Ekonomi Makro	
B. Kebijakan Keuangan	
C. Indikator pencapaian target Kinerja APBD	

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- A. Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- A. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
- B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- A. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
 - 1. Pendapatan
 - 2. Belanja
 - 3. Pembiayaan
 - 4. Aset
 - 5. Kewajiban
 - 6. Ekuitas dana
- B. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VII Penutup

Sumber : Standar Akuntansi Pemerintah N0.71 Tahun 2010

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Sugiyono (2004:11) Jenis penelitian ini jika dilihat dari tingkat eksplansi terdiri dari tiga jenis penelitian yaitu :

1) Penelitian Deskriptif

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel/lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

2) Penelitian Komparatif

Penelitian ini bersifat membandingkan dua variabel atau lebih. Kedua variabel bias jadi tidak berhubungan atau mandiri. Tujuan penelitian ini antara lain untuk bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih.

3) Penelitian Asosiatif

(Sugiyono, 2004:11) Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif yaitu membandingkan laporan keuangan pemerintah dengan laporan keuangan SAP No. 71 Tahun 2010 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai, Palembang. No Telp (0711)-317599 Fax (0711) 351972 .

C. Operasionalisasi Variabel

Sugiyono (2010:58) operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Perbandingan penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai dengan SAP No. 71 Tahun 2010.	Membandingkan antara laporan keuangan yang dibuat oleh instansi dengan laporan keuangan berdasarkan SAP No. 71 Tahun 2010 dimana untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.	1. Laporan Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja 3. Laporan Arus Kas

Sumber: Penulis, 2015

D. Data yang Digunakan

Menurut Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:146) adapun cara memperoleh data sebagai berikut :

1. Data Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).

2. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui perantara

Data yang akan diperlukan dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari :

- a. Data primer yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung.
- b. Data Sekunder yang terdiri dari :
 - 1) Sejarah singkat BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
 - 2) Data laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011 sampai dengan 2013 yang terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2013:129-141) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui :

1. Kuisisioner

Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. Responden adalah orang yang memberikan tanggapan atas kuisisioner yang diajukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan kegiatan adalah setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran, pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

4. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan Studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa laporan keuangan yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Sugiyono (2013:13) penelitian menurut jenis dan analisis terdiri dari:

a. Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif yaitu metode analisis yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar untuk melakukan uraian atau penafsiran.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif yaitu metode analisis yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menjelaskan angka-angka yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan perbandingan pelaporan keuangan menurut pemerintah dan menurut SAP NO. 71 Tahun 2010 sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan mendiskripsikan variabel – variabel dalam penelitian ini yang menjelaskan perbandingan laporan keuangan berdasarkan SAP No. 71 Tahun 2010.

2. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan antara laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas yang dibuat oleh BPKAD dibandingkan dengan SAP No.71 Tahun 2010.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Biro Keuangan merupakan salah satu unsur dari organisasi pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas mengelola keuangan organisasi tersebut. Sejak tahun 1965 segala urusan keuangan daerah di pegang oleh Biro Keuangan yang berkantor di Jl. Kapten A.Rivai No.3 Palembang. Kemudian pada tahun 2012 dengan telah di undangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang perubahan Ketiga atas digantinya Biro Keuangan menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Bahwa pe xngelolaan aset atau barang milik daerah merupakan salah satu elemen penting dalam penelitian kinerja keuangan pemerintah daerah, oleh karena itu penggabungannya dengan tugas pokok dan fungsi keuangan menjadikan beban kerja biro keuangan dan aset daerah semakin berat, sehingga tidak sesuai lagi apabila tetap berada pada struktur organisasi sekretariat daerah yang merupakan unsur staf yang mempunyai fungsi koordinasi. Guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang keuangan dan aset daerah maka Biro Keuangan dan Aset Daerah

perlu ditingkatkan statusnya menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah masih satu lingkup pada Kantor Gubernur Sumatera Selatan yang bertempat di Jl. Kapten A. Rivai Telp. (0711) 317559 Fax (0711) 351972 Palembang.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah terwujudnya *Good Governace* dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang prima.

b. Misi

- 1) Mengelola Keuangan dan Barang Milik Negara secara optimal
- 2) Memberikan pelayanan prima di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik Negara
- 3) Menyediakan informasi keuangan dan barang milik Negara dengan cepat, tepat, dan akurat
- 4) Menjadikan aparat bidang keuangan yang profesional
- 5) Mengelola Keuangan dan Barang Milik Negara secara optimal

- 6) Memberikan pelayanan prima di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik Negara
- 7) Menyediakan informasi keuangan dan barang milik Negara dengan cepat, tepat, dan akurat
- 8) Menjadikan aparat bidang keuangan yang profesional.

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka menunjang rencana strategis pembangunan daerah Sumatera Selatan maka arah kebijakan umum pengelola keuangan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah.
- b. Meningkatkan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

4. Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Struktur Organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu di mana masing-masing diberi tugas wewenang dan

tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi di tuangkan dalam struktur dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang - orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah di tentukan.

Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab serta hubungan antara bagian berdasarkan susunan tingkat hierarki. Struktur organisasi juga diharapkan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Organisasi yang dimaksud untuk membina keharmonisan kerja, agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara teratur dan penuh tanggung jawab. rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang di inginkan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal.

Dengan berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Selatan, tentang uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris Membawahi:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

- 2) Subbagian Keuangan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. Bidang Anggaran
- 1) Subbidang Sosial
 - 2) Subbidang Ekonomi
 - 3) Subbidang Sarana dan Prasarana
- d. Bidang Perbendaharaan
- 1) Subbidang Pengelola Kas Daerah
 - 2) Subbidang Belanja Langsung
 - 3) Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
- e. Bidang Akuntansi
- 1) Subbidang Akuntansi Penerimaan
 - 2) Subbidang Akuntansi Pengeluaran
 - 3) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan
- f. Bidang Penatausahaan dan Pemeliharaan Aset
- 1) Subbidang Penatausahaan Aset
 - 2) Subbidang Pemeliharaan Aset

- g. Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset
 - 1) Subbidang Pemanfaatan Aset
 - 2) Subbidang Pengamanan Aset
- h. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten Kota
 - 1) Subbidang Pembinaan Keuangan Wilayah I
 - 2) Subbidang Pembinaan Keuangan Wilayah II
 - 3) Subbidang Pembinaan Keuangan Wilayah III

5. Tugas Dan Fungsi BPKAD Provinsi Sumsel

Adapun Tugas dan Fungsi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

- a. Kepala Badan
 - 1) Kepala Badan Mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala BPKAD mempunyai tugas:
 - a) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 - b) Melaksanakan Anggaran SKPD

- c) Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - d) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPKD
 - e) Mengajukan rencana kebutuhan milik daerah
- 2) Kepala Badan selaku Kepala SKPKD dalam melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Mempunyai tugas:
- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD
 - b) Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
 - c) Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD)
 - d) Menyusun laporan keuangan daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- 3) Kepala BPKAD selaku BUD mempunyai tugas:
- a) Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD
 - b) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
 - c) Menerbitkan surat penyediaan dana (SPD)
 - d) Menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D)
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 4) Kepala BPKAD selaku Pembantu Pengelola Aset / Barang milik daerah mempunyai tugas:

- a) Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah
- b) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang dan melakukan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah.
- c) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah
- d) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sekretaris Badan

Sekretaris Badan mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala BPKAD dalam merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sekretaris di bantu oleh:

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a) Mengelola surat masuk dan surat keluar
 - b) Merencanakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c) Melaksanakan pemeliharaan barang-barang kantor dan inventaris

- d) Menjaga dan memelihara lingkungan kerja kantor
 - e) Melaksanakan pencatatan dan membuat laporan kepegawaian
 - f) Membuat daftar unit kepangkatan
 - g) Merencanakan kebutuhan pendidikan dan latihan terhadap pegawai
 - h) Mengupayakan kesejahteraan pegawai
- 2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
- a) Meneliti surat perintah pembayaran (SPP) yang di sampaikan bendahara pengeluaran yang diketahui/ditetujui pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)
 - b) Meneliti kelengkapan SPP Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GUP)/ Tambah Uang Persediaan (TUP)/ Langsung (LS), dan LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya
 - c) Melakukan verifikasi SPP
 - d) Menyiapkan Surat Perintah membayar (SPM)
 - e) Melakukan verifikasi surat harian penerimaan SKPKD
 - f) Melaksanakan akuntansi SKPKD dan menyiapkan laporan keuangan SKPKD
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3) Subbagian Perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas:
- a) Menyusun RKA/RKAP SKPKD

- b) Menyusun DPA/DPPA SKPKD
 - c) Menyiapkan laporan kinerja
 - d) Menyusun kebutuhan anggaran kas
 - e) Menghimpun data dan menyiapkan bahan perencanaan kerja dan rencana strategis, rencana kerja tahunan
 - f) Mengkoordinasikan implementasikan sistem pengelolaan keuangan dan barang (SIMDA)
 - g) Mengkoordinir penyusunan program
 - h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD, mengkoordinasikan dan memverifikasi RKA, DPA dan DPPA, menyiapkan data untuk penerbitan SPD, anggaran kas, dan menyiapkan data petunjuk teknis yang berkaitan dengan pinjaman atas nama Pemerintah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang Anggaran di Bantu:

- 1) Subbidang sosial mempunyai tugas:
 - a) Menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD

- b) Menghimpun dan meneliti bahan serta data-data pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta rancangan perubahan APBD
 - c) Melaksanakan verifikasi RKA dan RKAP sebagai bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
 - d) Menyiapkan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
 - e) Menyiapkan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
 - f) Menyiapkan penerbitan SPD
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 2) Subbidang Ekonomi mempunyai tugas:
- a) Menyiapkan bahan perumusan petunjuk penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
 - b) Menghimpun dan meneliti bahan serta data-data pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta rancangan perubahan APBD
 - c) Melaksanakan verifikasi RKA dan RKAP
 - d) Menyiapkan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
 - e) Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas belanja dan pembiayaan

- f) Menyiapkan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
 - g) Menyiapkan penerbitan SPD
- 3) Subbidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
- a) Menyiapkan bahan perumusan petunjuk rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
 - b) Menghimpun dan meneliti bahan serta data-data pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta rancangan APBD
 - c) Melaksanakan verifikasi RKA dan RKAP
 - d) Menyiapkan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
 - e) Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas belanja dan pembiayaan
 - f) Menyiapkan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan penerbitan SPD
- d. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dibidang penerimaan dan pengeluaran kas.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang Perbendaharaan di bantu:

- 1) Subbidang Pengelola Kas Daerah mempunyai tugas:
 - a) Melakukan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank yang telah di tunjuk
 - b) Melaksanakan sistem pengeluaran kas daerah
 - c) Melakukan verifikasi penerimaan dan pengeluaran kas SKPD
 - d) Melaksanakan pengelolaan kas non anggaran
 - e) Menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik
 - f) Menerbitkan keputusan Gubernur tentang pembukaan rekening bendahara SKPD
- 2) Subbidang Belanja Langsung mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan registrasi atas SPM dan SP2D belanja SKPD
 - b) Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen
 - c) Melaksanakan pencetakan SP2D dan daftar pengantar SP2D
 - d) Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PPK
 - e) Menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D
 - f) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan perbendaharaan terhadap SKPD
- 3) Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan registrasi atas SPM dan SP2D belanja SKPD

- b) Melaksanakan pengendalian atas SPM dan SP2D meneliti dokumen SPM
 - c) Menerbitkan SP2D dan daftar pengantar SP2D
 - d) Melakukan pemungutan dan pemotongan PPK
 - e) Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD
 - f) Menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D
 - g) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan perbendaharaan terhadap SKPD.
- e. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi realisasi APBD, restitusi dan pelaporan keuangan daerah serta pembinaan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang Akuntansi di bantu:

- 1) Subbidang Akuntansi Penerimaan mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan identifikasi dan klarifikasi transaksi penerimaan
 - b) Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dengan SKPD terkait
 - c) Menyiapkan laporan penerimaan secara periodik

- d) Menyiapkan koreksi jurnal
 - e) Menyiapkan realisasi penerimaan APBD tahunan
 - f) Menyiapkan administrasi TP-TPTGR
 - g) Melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah
- 2) Subbidang Akuntansi Pengeluaran mempunyai tugas:
- a) Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi transaksi pengeluaran
 - b) Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran dengan SKPD terkait
 - c) Menyiapkan laporan pengeluaran secara periodik
 - d) Menyiapkan koreksi jurnal pengeluaran
 - e) Menyiapkan laporan realisasi pengeluaran APBD semester
 - f) Menyiapkan laporan realisasi pengeluaran APBD tahunan
- 3) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a) Menyusun kebijakan akuntansi
 - b) Melakukan rekonsiliasi laporan penerimaan dan pengeluaran dengan SKPD
 - c) Menyusun laporan realisasi APBD semester dan prognosis 6 bulan berikutnya
 - d) Menyusun laporan realisasi APBD tahunan
 - e) Menyiapkan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

- f) Menyiapkan ikhtisar laporan keuangan BUMD
- g) Menyiapkan rancangan perda tentang pertanggungjawaban APBD
- h) Menyajikan sistem informasi keuangan daerah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- i) Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan BLUD

f. Bidang Penatusahaan dan Pemeliharaan Aset

Bidang Penatusahaan dan Pemeliharaan Aset mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan penatusahaan dan pemeliharaan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang Penatusahaan dan Pemeliharaan Aset di bantu:

- 1) Subbidang Penatusahaan Aset mempunyai tugas:
 - a) Menyiapkan bahan dan menyusun perumusan kebijakan daerah di bidang penatusahaan aset
 - b) Melaksanakan pengendalian terhadap mutasi barang/aset SKPD dan unit kerja lainnya
 - c) Menghimpun, meneliti dan menyusun bahan dalam rangka penyusunan perencanaan kebutuhan barang unit (RKBU)

d) Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi serta pengendalian aset daerah

2) Subbidang Pemeliharaan Aset mempunyai tugas:

a) Menyiapkan bahan dan menyusun perumusan kebijakan daerah di bidang pemeliharaan aset

b) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeliharaan aset

c) Melaksanakan proses administrasi pemeliharaan aset

d) Menghimpun dan mengkoordinasikan rencana kebutuhan pemeliharaan aset daerah.

g. Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan dan pengamanan aset.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset di bantu:

1) Subbidang Pemanfaatan Aset mempunyai tugas:

a) Menyiapkan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang pemanfaatan aset

b) Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan aset

c) Menyiapkan bahan administrasi penggunaan penghapusan dan perubahan status hukum aset daerah

- d) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi unit kerja terkait dalam pemanfaatan aset
 - e) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan aset daerah
- 2) Subbidang Pengamanan Aset mempunyai tugas:
- a) Bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang pengamanan aset
 - b) Melaksanakan pengawasan dan pengamanan aset
 - c) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi unit kerja terkait di bidang pengamanan aset
 - d) Melaksanakan pembinaan pada unit kerja terkait terhadap aset-aset milik pemerintah provinsi
 - e) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota

Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan evaluasi serta bimbingan penyusunan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengolahan data keuangan daerah serta memfasilitasi dana transfer pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota dan memberikan pembinaan terkait dengan

pemanfaatan penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan dana transfer.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota di bantu :

1) Subbidang Pembinaan Keuangan Wilayah I meliputi:

Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin.

2) Subbidang Pembinaan Keuangan Wilayah II meliputi:

Kota Lubuk Linggau, kabupaten Musi rawas, kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagar Alam

3) Subbidang Pembinaan Keuangan Wilayah III Meliputi:

Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komreing Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih

Masing – masing mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyiapkan rancangan perda kabupaten/kota dalam melaksanakan evaluasi
- b) Menyiapkan bahan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD

- c) Menyiapkan bahan laporan hasil evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota
- d) Menyiapkan bahan bimbingan teknis
- e) Menyiapkan bahan pengelolaan data APBD
- f) Menyiapkan bahan monitoring dan pelaporan secara berkala hasil evaluasi APBD
- g) Menyampaikan bahan laporan hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada Bupati/Walikota
- h) Melakukan pembinaan fasilitasi pengelolaan dana transfer kepada pemerintah kabupaten/kota
- i) Mengolah dan melakukan konversi data keuangan daerah
- j) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Data Personalia

Dari segi personalia kepegawaian, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah memenuhi kuota struktur organisasi yang dapat terlihat jelas dari penjelasan dibawah ini perihal mengenai data personalia jumlah kepegawaian, jumlah dari data pimpinan pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.1
Data Personalia BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

No.	Keterangan	Jumlah Orang
1	Jumlah Pegawai : a. PNS b. CPNS c. Honorer	108 1 44
2	Tingkat Pendidikan : a. S2 b. S1 c. D4 d. D3 e. SMA f. STM g. SMEA h. SLTP i. SD	18 70 2 6 8 1 1 3 0
3	Jenis kepegawaian : a. PNS b. CPNS c. Pegawai Harian/Kontrak	108 1 38
4	Jenis Kelamin : a. Laki - laki b. Perempuan	44 65
5	Pangkat/Golongan : a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II	8 94 7

Sumber : Penulis, 2015

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Laporan Neraca

Neraca yang disusun untuk pertama kali merupakan titik tolak dan dasar memulai pencatatan transaksi akuntansi pada periode berikutnya. Keandalan dari informasi tentang aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca yang disusun untuk pertama kali adalah sangat penting dalam membangun sistem akuntansi pemerintah daerah karena jumlah-jumlah yang disajikan dalam neraca yang disusun untuk pertama kali ini akan menjadi saldo awal yang akan terus terbawa dalam sistem akuntansi periode berikutnya. Penyusunan neraca untuk pertama kali mengharuskan adanya data yang valid.

Bentuk dan susunan Neraca Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian Tahun 2010 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga sejak saat itu PP No. 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. Format laporan Neraca berdasarkan SAP No.71 Tahun 2010 tersebut dapat di lihat pada landasan teori BAB II.

Di bawah ini format Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan :

Tabel IV.2
Neraca
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
Per 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah)

Uraian	2013	2012
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Setara Kas	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx
Piutang Retribusi Daerah	xxx	xxx
Piutang Dana Bagi Hasil	xxx	xxx
Piutang Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
Piutang Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
Piutang Lain - lain	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Aktiva Untuk Di konsolidasikan	xxx	xxx
Belanja Dibayar Di muka	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Nonpermanen		
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	xxx	xxx
Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
Penyertaan dalam Modal Proyek Pembangunan	xxx	xxx
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	xxx	xxx
Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Investasi Permanen	xxx	xxx
Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
ASET TETAP		
Tanah	xxx	xxx

Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX
Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan	XXX	XXX
Jumlah Aset Tetap	XXX	XXX
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	XXX	XXX
Jumlah Dana Cadangan	XXX	XXX
ASET LAINNYA		
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	XXX	XXX
Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah	XXX	XXX
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
Aset Tidak Berwujud	XXX	XXX
Aset Lain-Lain	XXX	XXX
Jumlah Aset Lainnya	XXX	XXX
JUMLAH ASET	XXX	XXX
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
Utang Bunga	XXX	XXX
Utang Pajak	XXX	XXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Bank	XXX	XXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Obligasi	XXX	XXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat	XXX	XXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Provinsi	XXX	XXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	XXX	XXX
Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	XXX
Utang Jangka Pendek Lainnya	XXX	XXX
Utang Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
Utang kepada PT. Bukit Asam	XXX	XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	XXX	XXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX
Utang Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
Utang Pemerintah Pusat	XXX	XXX
Utang Pemerintah Provinsi	XXX	XXX
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	XXX	XXX
Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX
Hutang Obligasi	XXX	XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX
JUMLAH KEWAJIBAN	XXX	XXX
EKUITAS		
EKUITAS DANA LANCAR		
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran	XXX	XXX

Cadangan Piutang	xxx	xxx
Cadangan persediaan	xxx	xxx
Dana Yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	xxx	xxx
Pendapatan yang Ditangguhkan	xxx	xxx
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	xxx	xxx
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	xxx	xxx
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	xxx	xxx
Dana Yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	xxx	xxx
EKUITAS DANA CADANGAN		
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	xxx	xxx
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	xxx	xxx
Jumlah Ekuitas Dana	xxx	xxx
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	xxx	xxx

Sumber : Laporan Neraca BPKAD Prov. Sumatera Selatan, 2015

Berdasarkan hasil analisis perbandingan Laporan Neraca BPKAD terhadap Standar Akuntansi Pemerintah No 71 Tahun 2010 dinyatakan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No 71 Tahun 2010. . Namun pada pos - pos tertentu masih ada yang belum sesuai dengan SAP seperti pada akun Aset Lancar tidak perlu lagi mencamtumkan akun Setara Kas, Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus, Aktiva yang di konsolidasikan. Pada Akun Investasi Nonpermanen yaitu Pinjaman kepada Perusahaan Negara, Pinjaman kepada Perusahaan Daerah, Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebaiknya dihilangkan. Akun Kewajiban Jangka Pendek perlu menghilangkan akun Utang Pajak, Utang Bagi Hasil Pajak karena tidak sesuai dengan SAP No.71 Tahun 2010.

Hasil Analisis berikutnya yaitu perlu dilakukan penambahan Pos-pos akun tertentu agar sesuai dengan SAP No. 71 Tahun 2010, seperti pada akun Aset Lancar perlu mencatat akun Penyisihan Piutang, Bagian Lancar Pinjaman baik kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Akun Investasi Nonpermanen perlu mencamtumkan akun Pinjaman Jangka Panjang, Investasi Dalam Proyek Pembangunan. Pada akun Kewajiban Jangka Pendek perlu menambahkan Akun Utang Belanja dan pada akun Kewajiban Jangka Panjang perlu mencatat akun Utang Jangka Panjang Lainnya.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode tertentu. tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian terget-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran

seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Transfer
- c. Belanja
- d. Surplus atau defisit
- e. Penerimaan pembiayaan
- f. Pengeluaran pembiayaan
- g. Pembiayaan neto
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah propinsi.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Entitas Pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi Belanja menurut organisasi disajikan Laporan Realisasi Anggaran atau Catatan Atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi di sajikan Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa tanpa nilai perolehan harus dilaporkan dalam Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Transaksi tersebut harus diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa dalam bentuk hibah dalam wujud barang rampasan, dan jasa konsultasi.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode

yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun. Entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komperatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Format laporan Realisasi dan anggaran berdasarkan SAP No.71 Tahun 2010 tersebut dapat di lihat pada landasan teori BAB II.

Berikut Tabel IV.2 adalah contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan oleh BPKAD Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 dan 2012.

Tabel IV.3
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X1
<u>PENDAPATAN</u>				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxxx	xxxx	xx	xxxx
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA				
PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	xxx	xxx	xx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
<u>BELANJA</u>				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Bantuan keuangan	xxx	xxx	xx	xxx
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Bangunan dan Gedung	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx

Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
<u>TRANSFER</u>				
TRANSFER BAGI HASIL KE KABUPATEN/KOTA/DESA	xxx	xxx	xx	xxx
Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
SURPLUS/DEFISIT	xxx	xxx	xx	xxx
<u>PEMBIAYAAN</u>				
PENERIMAAN DAERAH				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
PENGELUARAN DAERAH				
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pembayaran Pokok Utang	xxx	xxx	xxx	xxx
PEMBIAYAAN NETO	xxx	xxx	xxx	xxx
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Sumsel, 2015

Berdasarkan hasil analisis perbandingan Laporan Realisasi Anggaran BPKAD terhadap Standar Akuntansi Pemerintah No 71 Tahun 2010 dinyatakan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No 71 Tahun 2010. Namun pada pos - pos akun tertentu masih ada yang belum sesuai dengan SAP yang sebaiknya perlu di lakukan penambahan nama akun agar sesuai dengan SAP No. 71 Tahun 2010.

Berikut tabel daftar nama akun yang perlu dicantumkan pada Laporan Realisasi Anggaran pada BPKAD agar sesuai dengan SAP No. 71 Tahun 2010 :

Tabel IV.4
Hasil Analisis Laporan Realisasi Anggaran BPKAD

Akun Yang Perlu di Cantumkan	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%	Realisasi 2012
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
	XXX	XXX	XX	XXX
<u>BELANJA</u>				
Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
<u>TRANSFER</u>				
TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA				
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XXX	XXX
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XXX	XXX
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XXX	XXX
<u>PEMBIAYAAN</u>				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XXX	XXX
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XXX	XXX
Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XXX	XXX
Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
Pinjaman Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XXX	XXX
Pinjaman Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XXX	XXX
Pinjaman Dalam Negeri Obligasi	XXX	XXX	XXX	XXX
Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XXX	XXX
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XXX	XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XXX	XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XXX	XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XXX	XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XXX	XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XXX	XXX
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX

Sumber : Penulis, 2015

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

Setara kas pemerintah ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada resiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehan.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

Suatu transaksi dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang yang akan diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi. Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara:

a. Metode Langsung

Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

b. Metode Tidak Langsung

Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional non kas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/ yang akan datang, serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi aset non keuangan dan pembiayaan.

Entitas pelaporan pemerintah pusat/ daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi.

Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas

dimasa yang akan datang.

- b. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan.
- c. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibuktikan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atas pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pengecualian transaksi buku kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah,

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan

likuiditas suatu entitas pelaporan. Contoh laporan arus kas Pemerintah Provinsi berdasarkan SAP No. 71 Tahun 2010 dapat dilihat BAB II pada Landasan Teori.

Berikut Tabel IV.6 adalah contoh format Laporan Arus Kas BPKAD Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2013 dan 2012 :

Tabel IV.5
Laporan Arus Kas
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
Per 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	xxx	xxx
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx
Pendapatan Hibah	xxx	xxx
Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
Arus Keluar Kas		
Belanja Pegawai	xxx	xxx
Belanja Barang	xxx	xxx
Belanja Subsidi	xxx	xxx
Belanja Hibah	xxx	xxx
Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx
Belanja Tak Terduga	xxx	xxx
Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas operasi	xxx	xxx
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Jumlah Arus Kas Masuk	xxx	xxx
Arus Kas Keluar		
Belanja Tanah	xxx	xxx

Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX
Belanja Aset tetap Lainnya	XXX	XXX
Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX
Jumlah Arus Kas Keluar	XXX	XXX
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	XXX	XXX
Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman Daerah	XXX	XXX
Jumlah Arus Kas Masuk	XXX	XXX
Arus Kas Keluar		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	XXX	XXX
Pembayaran Pokok Utang	XXX	XXX
Jumlah Arus Kas Keluar Kas	XXX	XXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	XXX	XXX
Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
Jumlah Arus Kas Masuk	XXX	XXX
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
Jumlah Arus Kas Keluar	XXX	XXX
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran	XXX	XXX
Kenaikan/(Penurunan) bersih Kas Selama Periode	XXX	XXX
Saldo Awal Kas di BUD	XXX	XXX
Saldo Akhir Kas di BUD	XXX	XXX
Kas di Daerah	XXX	XXX
Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
Setara Kas	XXX	XXX

Sumber : Laporan Arus Kas BPKAD Prov. Sumatera Selatan, 2015

Berdasarkan hasil analisis perbandingan Laporan Arus Kas BPKAD Provinsi Sumatera Selatan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah No 71 Tahun 2010 dinyatakan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No 71 Tahun 2010. Namun pada pos - pos akun tertentu masih ada

yang belum sesuai dengan SAP yang sebaiknya perlu di lakukan penambahan nama akun agar sesuai dengan SAP No. 71 Tahun 2010.

Berikut tabel daftar nama akun yang perlu dicantumkan secara rinci pada Laporan Arus Kas pada BPKAD agar sesuai dengan SAP No. 71 Tahun 2010 :

Tabel IV.6
Hasil Analisis Laporan Arus Kas BPKAD

Daftar Nama Akun Yang Perlu di cantumkan	2013	2012
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Dana Darurat	xxx	xxx
Penerimaan Lainnya	xxx	xxx
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Bunga	xxx	xxx
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	xxx	xxx
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	xxx	xxx
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx

Sumber : *Penulis*, 2015

Hasil Analisis berikutnya yaitu perlu dilakukan penghilangan Pos-pos akun tertentu agar sesuai dengan SAP No. 71 Tahun 2010, seperti pada akun Belanja Bantuan Keuangan pada Arus Kas Keluar tidak perlu di cantumkan.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Meliputi Penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh

karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembaca.

Untuk menghindari kesalahpahaman, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjaab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai sehingga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, entitas pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

Kebijakan fiskal yang perlu di ungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, dan penentuan sumber dan penggunaan biaya.

Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD. Sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi / ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara.

Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD Berikut tingkat tercapainya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain produk domestik Bruto/ Produk harga minyak, tingkat suku bunga, dan neraca pembayaran. Pengungkapan untuk masing – masing pos pada laporan keuangan mengikuti standar berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar, dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengihtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan. Contoh format Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi menurut SAP No.71 Tahun 2010 dapat dilihat pada BAB II di landasan teori.

Berikut Format Catatan Atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan :

Tabel IV.7
Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

- A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
- C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja

APBD

- A. Ekonomi Makro
- B. Kebijakan Keuangan
- C. Indikator pencapaian target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- A. Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- A. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
- B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- A. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Pembiayaan

4. Aset
5. Kewajiban
6. Ekuitas dana

B. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VII Penutup

Sumber: Format catatan atas laporan keuangan Provinsi, 2015

Berdasarkan hasil analisis perbandingan Catatan atas Laporan Keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah No 71 tahun 2010 telah sesuai dengan kriteria Standar Akuntansi Pemerintah No 71 tahun 2010 yang berlaku di Indonesia.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah PP No. 71 Tahun 2010. Namun pada rincian tertentu perlu di telaah kembali dan diperbaiki agar sesuai dengan SAP No. 71 Tahun 2010.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan bab IV, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Agar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat mempertahankan dalam proses penyusunan laporan keuangan.
2. Sebaiknya Laporan keuangan di teliti lebih rinci agar lebih sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 71 Tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim.2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*.Bandung,.Salemba Empat
- Akbar Reza.2014.*Fakto-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah*. Palembang. (Skripsi Tidak dipublikasikan)
- Amelia.2013. *Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Perum Perumnas Regional II Palembang*.Palembang,Universitas Muhamadiyah Palembang.(Skripsi tidak dipublikasikan).
- Bambang Supomo.2002. *Metode Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi pertama. BDFE, Yogyakarta.
- Deddy Nordiawan.2006. *Akuntansi Sektor Publik*.Bandung, Alfabeta.
- Indra Bastian.2006.*Sistem Akuntansi Sektor Publik*.Jakarta.Salemba Empat
- Mardiasmo.2002.*Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta.
- Nadya Karima.2015. *Evaluasi Laporan Keuangan Menurut Standar Akuntansi Pemerintah No.71 tahun 2010 pada Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan* (Skripsi Tidak dipublikasikan)
- Nugraheni & Subaweh.2008. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*.Jurnal Ekonomi bisnis No.1 vol 13.
- Sugiyono.2006. *Metode Penelitian Bisnis*.Bandung, Alfabeta.
- Syafri Harahap, Sofyan.2011.*Teori Akuntansi*.Raja Grafindo Persada.
- Winwin, Yadiati.2010.*Teori Akuntansi*. Jakarta, Prenada Media Group.
- <http://www.bpkad.sumselprov.go.id/> (diakses tanggal 30 Januari 2015)
- https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2014/02/PP_71_TAHUN_2010.pdf
(diakses tanggal 30 Januari 2015)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kapten A.Rivai Tlp (0711) 317559 Fax (0711) 351972 Palembang 30129

Nomor : 901/00500/BPKAD-I/2015
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Keterangan Selesai Riset

Palembang, 5 Maret 2015

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang
di

Palembang

Dengan Hormat,

Menanggapi surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : 541/H-5/FEB-UMP/I/2015 Tanggal 03 Maret 2015, perihal Keterangan Selesai Riset untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi akhir atas nama :

Nama : Rio Dwi Nugraha

NIM : 22 2009 216

Jurusan : Akuntansi

Memang benar telah mengambil data telah melaksanakan penelitian untuk laporan akhir di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan hasil data hanya dipergunakan semata-mata untuk keperluan akademik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Prov. Sumsel



Rita Elysa Siregar, SE.Ak

Pembina Tingkat I

NIP.196407191992032002



LEMBAGA BAHASA DAN PENGEMBANGAN KARIR (LBPK)
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI TES TOEFL

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya ujian Komprehensif di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, maka mahasiswa dengan nama dibawah ini telah mengikuti Tes TOEFL, untuk di berikan sementara mendaftar pada ujian tersebut, yaitu :

NO	NAME	STUDENT NUMBER
1	Pio Dwi Nugraha	22 2009 216

Surat Keterangan Ini di Laporkan ASLI,

Tidak Boleh difotocopy dan hanya berlaku sampai dengan **31 AGUSTUS 2014**

Palembang, 15 Juli 2014

Dean

Wakil Dean I



[Signature]
 Drs. Sunardi, SE, M.Si

NIDN : 0206046303



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

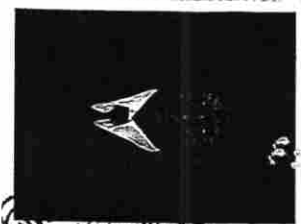
NAMA : RIO DWI NUGRAHA
NIM : 222009216
JURUSAN : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat MEMUASKAN

Palembang, 07 Maret 2015

an. Dekan

Wakil Dekan IV



Antoni, M.H.I.



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Rio Dwi Nugraha	PEMBIMBING
NIM : 22 2009 216	KETUA Welly, S.E, M.Si
PROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBANDINGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) NO 71 TAHUN 2010 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	20/2/2015	BAB I s/d III	<i>[Signature]</i>		Perbaiki
2					
3	26/2/2015	BAB I s/d III	<i>[Signature]</i>		Acc lanjut
4					BAB IV s/d V
5					
6	27/2/2015	BAB I s/d III	<i>[Signature]</i>		Acc lanjut
7					
8	2/3/2015	BAB I s/d III	<i>[Signature]</i>		Perbaiki lagi
9					
10	4/3/2015	BAB IV s/d V	<i>[Signature]</i>		Perbaiki lagi
11					
12	6/3/2015	BAB IV s/d V	<i>[Signature]</i>		Perbaiki
13					
14	9/3/2015	BAB IV s/d V	<i>[Signature]</i>		Acc lanjut
15					
16	10/3/2015	Abstrak	<i>[Signature]</i>		Acc komprehensif

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang
 Pada tanggal 10/03/2015
 a.n. Dekan
 Program Studi
[Signature]
Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B)
Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 (B)
Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

Website: umpalembang.net/feump

Email : feump1g@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Senin, 30 Maret 2015
Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB
Nama : Rio Dwi Nugraha
NIM : 222009216
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) NO.71 TAHUN 2010 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Welly, S.E, M.Si	Pembimbing	8/4/2015	
2	Betri, S.E, M.Si, Ak., CA	Ketua Penguji	7/4/2015	
3	Welly, S.E, M.Si	Penguji I	7/4/2015	
4	Aprianto, S.E., M.Si	Penguji II	7/4/2015	

Palembang, April 2015
An Dekan
Kotaku Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si
NIDN/NBM : 0228115802/1021961

BIODATA PENULIS

Nama : Rio Dwi Nugraha
NIM : 22 2009 216
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 12 Januari 1991
Alamat : Perumahan Griya Sejahtera Blok E No.189
Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin.
Telepon : 089699980897
Nama Orang Tua :
 Ayah : Yusuf Supriadi
 Ibu : Yeyet Sumiati
Pekerjaan Orang Tua :
 Ayah : Wiraswasta
 Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang tua : Perumahan Griya Sejahtera Blok E No.189
Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin

Palembang, April 2015

Rio Dwi Nugraha